

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN) tercantum delapan misi pembangunan nasional Indonesia mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan, mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pembangunan nasional diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memprioritaskan kebutuhan tiap-tiap daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui pembangunan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan upaya meningkatkan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara

nasional dan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan cenderung meningkat akan menghambat pembangunan yang telah direncanakan pemerintah, maka salah satu indikator yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan penyakit dalam perekonomian yang bersifat multidimensional, dan upaya dalam mengatasi kemiskinan menjadi hal yang rumit. Upaya mengatasi kemiskinan sebaiknya dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Upaya pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan dan program pembangunan yang telah dirancang dan disepakati. Kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan perlu terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menjadi syarat utama bagi terciptanya penurunan tingkat kemiskinan walaupun pada kenyataannya masih banyak daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan di kabupaten indramayu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu mengalami pertumbuhan yang pluktiatif selama kurun waktu 14 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,54% serta pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 8,79% (BPS, 2015)

Jumlah penduduk merupakan suatu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Apabila jumlah penduduk diimbangi dengan kualitas yang memadai maka hal tersebut menjadi modal pembangunan yang handal, tetapi apabila kualitas penduduknya tidak memadai akan menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan apalagi bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan alat produksi. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dan cenderung bertambah banyak memerlukan kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin tinggi pula kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di suatu daerah. Jumlah penduduk kabupate indramayu

jawa barat tahun 2006-2009 terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan namun tahun berikutnya perlahan mulai tumbuh tetapi belum bisa menyamai kuantitas pada tahun 2006-2009, jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 1.744.897 jiwa (PUSDALISBANG, 2015).

Pengangguran merupakan masalah yang harus diatasi karena berkaitan erat dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan haruslah beriringan dengan demikian pengangguran yang tinggi karena jumlah penduduk yang terus bertambah dapat teratasi sehingga kemiskinan akan mengalami pengurangan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan karena terjadi ketidak seimbangan jumlah tenaga kerja dengan luas lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran di Kabupaten Indramayu tergolong masih tinggi, dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran di Kabupaten Indramayu tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2002, tingkat pengangguran sebesar 120139, kemudian naik menjadi 85370 di tahun 2003. Peningkatan tingkat pengangguran terjadi secara beruntun dari tahun 2008 dan tahun 2010, dari 73869 di tahun 2008 menjadi 86309 di tahun 2010 dan mulai mengalami penurunan kembali dai tahun

berikutnya. Pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2002 sebesar 120139 sedangkan yang terendah terjadi di tahun 2014 sebesar 61403 (BPS, 2015).

Pendidikan dijadikan *pioneer* dalam membangun bangsa karena pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan investasi pembentukan modal manusia dan pembangunan produktivitas manusia. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. XIX Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; Program Pemerintah Wajib Belajar 12 tahun gratis dalam mewujudkan “Indonesia Pintar” mulai diberlakukan pada bulan Juni 2015. Banyaknya lulusan sekolah menengah atas yang ada di kabupaten indramayu jumlah lulusan terbanyak terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6.757 sedangkan lulusan paling sedikit berada pada tahun 2002. Kenaikan secara berturut-turut terjadi pada tahun 2007-2010, yaitu sebesar 4.387 pada tahun 2007, di tahun 2008 sebesar 4.645, kemudian 4.961 tahun 2009, dan tahun 2010 sebesar 5.478. Secara umum terjadi pluktusi dari tahun ke tahun namun penurunan jumlah

lulusan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kenaikan jumlah lulusan Di Kabupaten Indramayu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 (BPS, 2015).

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. menunjukkan angka harapan hidup di Kabupaten Indramayu pada tahun 2002 – 2015. Angka harapan hidup mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 14 tahun, dari 63,75 persen di tahun 2002 menjadi 66,1 persen di tahun 2008 dan 70,59 di tahun 2015. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kurun waktu 2013-2014 dimana 67,74 di tahun 2013 menjadi 70,29 pada tahun 2014 (BPS, 2015).

Kabupaten dengan tingkat sosial ekonomi yang baik cenderung akan lebih teratur dan tertata dengan baik sehingga masalah-masalah sosial ekonomi akan lebih mudah dikendalikan. Pada aspek luas wilayah, akan berkaitan dengan tingkat mobilitas dan interaksi antar penduduk. Hal tersebut di atas merupakan faktor penting dalam penentuan strategi pembangunan suatu kabupaten yang mempunyai masalah kemiskinan cukup tinggi dan harus segera diselesaikan dengan mengambil kebijakan yang tepat dan signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi sehingga penting sekiranya berbagai informasi yang

dapat dijadikan acuan/atau pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan supaya dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Menurut BPS (2003), seseorang tergolong kedalam penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

**Tabel 1.1**

**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Provinsi Jawa Barat  
tahun 2008-2015**

| No | Kab/Kota<br>Kabupaten | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                       | (%)   | (%)   | (%)   | (%)   | (%)   | (%)   |
| 1  | Bogor                 | 9,97  | 9,65  | 8,82  | 9,54  | 8,91  | 8,96  |
| 2  | Sukabumi              | 10,65 | 10,28 | 9,78  | 9,24  | 8,81  | 8,96  |
| 3  | Cianjur               | 14,32 | 13,82 | 13,17 | 12,02 | 11,47 | 12,21 |
| 4  | Bandung               | 9,29  | 8,99  | 8,32  | 7,94  | 7,65  | 8     |
| 5  | Garut                 | 13,94 | 13,47 | 12,7  | 12,79 | 12,47 | 12,81 |
| 6  | Tasikmalaya           | 12,78 | 12,36 | 11,75 | 11,57 | 11,26 | 11,99 |
| 7  | Ciamis                | 10,34 | 9,98  | 9,61  | 8,62  | 8,38  | 8,98  |
| 8  | Kuningan              | 14,68 | 14,2  | 13,69 | 13,34 | 12,72 | 13,97 |
| 9  | Cirebon               | 16,12 | 15,56 | 14,94 | 14,65 | 14,22 | 14,77 |
| 10 | Majalengka            | 15,51 | 14,98 | 14,44 | 14,07 | 13,42 | 14,19 |
| 11 | Sumedang              | 12,94 | 12,48 | 11,85 | 11,31 | 10,78 | 11,36 |
| 12 | Indramayu             | 16,58 | 16,01 | 15,42 | 14,99 | 14,29 | 14,98 |
| 13 | Subang                | 13,54 | 13,06 | 12,47 | 12,35 | 11,73 | 12,27 |
| 14 | Purwakarta            | 10,57 | 10,22 | 9,56  | 9,28  | 8,8   | 9,14  |
| 15 | Karawang              | 12,21 | 11,8  | 11,1  | 10,69 | 10,15 | 10,37 |
| 16 | Bekasi                | 6,11  | 5,93  | 5,25  | 5,2   | 4,97  | 5,27  |
| 17 | Bandung<br>Barat      | 14,68 | 14,22 | 13,33 | 12,92 | 12,26 | 12,67 |
| 18 | Pangandaran           |       |       |       |       |       | 10,76 |

Sumber : PUSDALISBANG Provinsi Jawa Barat

Dilihat dari data tabel 1.1, bahwa Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di antara kabupaten-

kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat walaupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, yakni dari sebesar 16,58 persen pada tahun 2010 kemudian 16,01 persen pada tahun 2011 menjadi 15,42 persen pada tahun 2012 di tahun 2013 tingkat kemiskinannya sebesar 14,99 persen pada 2014 sebesar 14,29 persen, dan di tahun 2015 sebesar 14,98 persen (PUSDALISBANG, 2008-2014). Walaupun tingkat kemiskinan Kabupaten Indramayu terus mengalami penurunan setiap tahunnya namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu masih lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Hal ini merupakan suatu masalah yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang efektif yang dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengentasan masalah kemiskinan, karena itu peneliti tertarik mengambil topik tentang **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Indramayu Tahun 2002-2015”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2002-2015.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari analisis ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2002-2015

### **1.4 Kegunaan Praktis/Empiris**

Selain kegunaan teoritis diatas, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

1. Sebagai persyaratan akademis untuk menempuh gelar Sarjana Strata-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu di bangku kuliah
3. Sebagai tambahan bahan referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian di bidang ilmu ekonomi pembangunan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

